

# **RENCANA KERJA**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA DENPASAR**

**TAHUN 2022**



**DENPASAR**

**TAHUN 2021**



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 37);

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Kota Denpasar adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH

BAB V : PENUTUP

### Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 6 Juli 2021

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 6 Juli 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

TTD

I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 31

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA DENPASAR  
TAHUN 2022

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2022

DAFTAR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2022

1. RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2022
2. RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022
3. RENJA BLUD RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR TAHUN 2022
4. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2022
5. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022
6. RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022
7. RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2022
8. RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2022
9. RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2022
10. RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2022
11. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2022
12. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022
13. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2022
14. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2022
15. RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022
16. RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2022
17. RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022
18. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2022
19. RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022
20. RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022

21. RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022
22. RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2022
23. RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022
24. RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022
25. RENJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2022
26. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022
27. RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022
28. RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022
29. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2022
30. RENJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022
31. RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022
32. RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2022
33. RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2022
34. RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2022
35. RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2022
36. RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2022

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022.

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

JL. Melati No. 17 Denpasar Kode Pos 80223  
Telpon. (0361) 237979, 237920, Fax (0361) 237921  
www.denpasarkota.go.id email : [drpd@denpasarkota.go.id](mailto:drpd@denpasarkota.go.id)

---

**SEKRETARIS DPRD KOTA DENPASAR**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA DENPASAR**

**NOMOR 188.4/125/SEKRET.DPRD**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD  
KOTA DENPASAR TAHUN 2022**

**SEKRETARIS DPRD KOTA DENPASAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022
- b. bahwa untuk efektivitas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar;
- c. bahwa pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Diundangkan di Jakarta tanggal 12 Maret 2019).
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara pembahasan RPJPD, RPJMD dan RKPD
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ini adalah :

a) Menyusun Rancangan Renja meliputi:

- a. mengolah data dan informasi;
- b. menganalisis gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar;
- c. mengevaluasi Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun lalu;

b) Menyajikan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar :

- a. pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Indikatif indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Kerja

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar 2022 menjadi landasan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan pembangunan selama 1 (satu) tahun,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Nopember 2020

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 26 Nopember 2020  
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



I Putu Gede Dharmawiyasa, SE  
NIP. 19611003 198203 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA DENPASAR  
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2020  
NOMOR : 188.4/ 125 / SEKRET. DPRD  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA  
DENPASAR 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2022

Ketua : Sekretaris DPRD Kota Denpasar

Sekretaris : Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota  
Denpasar

Anggota : 1. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota  
Denpasar.  
2. Kepala Bagian Fasilitasi Fungsi Pembentukan  
Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan  
Sekretariat DPRD Kota Denpasar.  
3. Para Kasubag. Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Sekretaris DPRD Kota Denpasar



I. Putu Gede Dharma Wiyasa, SE  
NIP. 19611003 198203 1 004

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2020 .....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD .....	26
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar. ....	30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	33
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD .....</b>	<b>49</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Arah Kebijakannya.....	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021.....	49
3.3 Program dan Kegiatan .....	49
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD .....</b>	<b>60</b>
4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .....	60
4.2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d tahun 2021 Kota Denpasar .....	23
Tabel 2.2	Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar ....	27
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Denpasar .....	35
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Denpasar .....	48
Tabel 4.1	Rencana Program / Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Denpasar .....	64

## KATA PENGANTAR

### **Om Swastyastu,**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara NugrahaNya, kami telah berhasil merampungkan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjabarkan Visi, Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Materi penyusunan Rencana Kerja ini juga telah kami padukan dengan rencana pencapaian Pembangunan Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, sekaligus merealisasikan capaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Denpasar Tahun 2021.

Kami berharap program dan kegiatan yang terkandung dapat merepresentasikan kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislasi anggaran dan pengawasan.

Selanjutnya kami ingin mengajak seluruh pihak yang berkompeten untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar yaitu Denpasar kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan.

### **Om Shanti, Shanti, Shanti Om**

Denpasar, 17 Juni 2021  
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



**I Putu Cede Dharma Wiyasa, SE**  
**Nip. 19611003 198203 1 004**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dokumen perencanaan yang harus disusun dan ditetapkan setiap daerah (kabupaten/kota) adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004, perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan juga diamanatkan menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD, di mana dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RKPD, Renstra dan dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJMD.

Menindaklanjuti amanat tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kota Denpasar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022, yang selanjutnya disingkat Renja Tahun 2022.

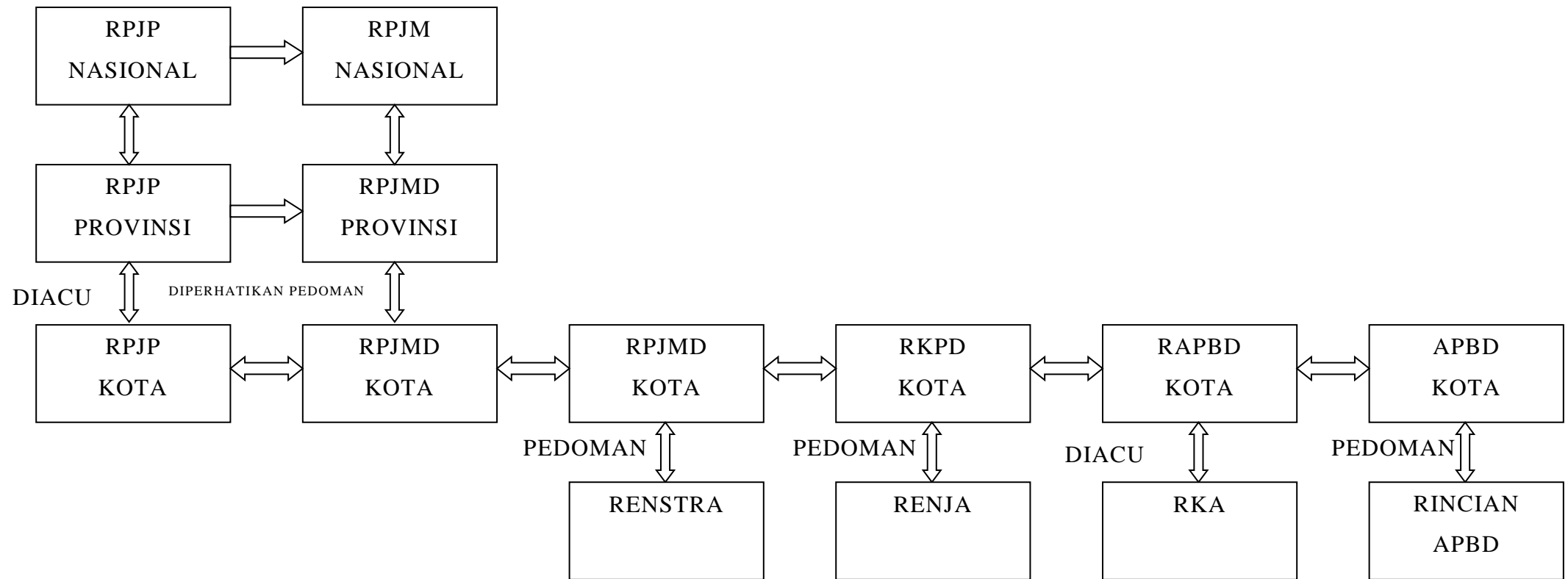
Rencana kerja (Renja) Tahun 2022, selain mengacu pada dokumen perencanaan sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Renja Tahun 2022 adalah rencana pembangunan tahunan, yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Denpasar, yaitu: ***Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.***

Misi yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah misi 3 :

**Kejujuran dan Sepirit Sewakadarma Sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).** Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kota Denpasar dengan dokumen perencanaan lainnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam mekanisme pelaksanaan pembangunan dan penganggaran keuangan daerah seperti dalam gambar di bawah ini :

GAMBAR : HUBUNGAN RENJA SEKRETARIAT DPRD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958, nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1649).
2. Undang-undang Nomor .1 tahun 1992 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II, (Lembaran Negara RI tahun 1992, nomor 9, tambahan lembaran Negara RI nomor 3465).
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepolisme. (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 75, Tambahan lembaran Negara RI nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004. nomor 104, tambahan Lembaran Negara R.I. nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2014, tentang perubahan atas, atas undang-undang. Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran Negara RI nomor 4817)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara RI nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran Negara RI nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 82, tambahan lembaran Negara RI nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
17. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia. Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 dan perubahannya nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer : 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
26. Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah kota Denpasar tahun 2005-2025.
27. Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
28. Surat Edaran No. 903/169/BAPPEDA tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal renja perangkat daerah tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya rencana kerja adalah sebagai penjabaran secara operasional visi misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan OPD selama 1 (satu) tahun.

Tujuan disusunnya rencana kerja adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran Renstra selama 1 (satu) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran program / kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Sekretariat DPRD dan kaitannya dengan dokumen lainnya.

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu 2020

Dalam bab ini dimuat kajian/telaah (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan perkiraan tahun berjalan.

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional. Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan, alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD**

#### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksudkan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD**

Pada bab ini di uraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra sesuai kebutuhan.

### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2020**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2021 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2016-2021.

Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar selama tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2021.

Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar, belanja tidak langsung anggaran Rp.46.563.971.766,- realisasi,- Rp 45.128.382.163 atau 96,91% dan belanja langsung dilaksanakan melalui 5 (lima) program dan 18 (delapan belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 53.093.200.580,- realisasinya Rp 37.704.288.747, 25 atau 71,01%

**Target :**

1. Belanja tidak langsung	Rp 44.696.633.636,-
Belanja pegawai	Rp 44.696.633.636,-
2. Belanja langsung	Rp 32.041.872.263,-
Belanja Pegawai	Rp 0,-
Belanja barang dan jasa	Rp 32.019.993.763,-
Belanja modal	Rp 21.878.500,-
3. Total Belanja Langsung dan Tidak Langsung	Rp 76.738.505.899,-

**Realisasi :**

1. Belanja tidak langsung	Rp 43.446.869.912,-
Belanja pegawai	Rp 43.446.869.912,-
2. Belanja langsung	Rp 24.674.535.540,-
Belanja pegawai	Rp 0,-

Belanja barang dan jasa	Rp 24.655.716.040,-
Belanja modal	Rp 18.819.500,-
3. Total Belanja Langsung dan Tidak Langsung	Rp 68.121.405.452,-

**Permasalahan /penjelasan:**

**Program : Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah..**

1. **Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah** : secara fisik (output) terealisasi 45 kali rapat dari target 45 kali rapat atau 100% dan Peraturan Daerah yang dihasilkan (Outcome) sebanyak 8 buah dari target 8 Perda atau 100% dan realisasi keuangan Rp 3.101.405.229,- dari target Rp 4.512.064.000,- atau 68,74%.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Perjalanan dinas untuk konsultasi mencari perbandingan berkaitan dengan ranperda yang dibahas kebanyakan pelaksanaannya di daerah terdekat karena menyesuaikan dengan rancangan yang akan di konsultasikan disamping mengefesienkan anggaran.

Solusi :

- Penganggaran perjalanan dinas kedepannya akan di konsultasikan lebih awal daerah tujuan yang dikunjungi untuk konsultasi mencari perbandingan terkait ranperda yang dibahas.
- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2020.

**Manfaat dari Peraturan Daerah : untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, APBD, dan pertanggungjawaban APBD.**

2. **Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah daerah,tokoh masyarakat/tokoh agama** : secara fisik (output) terealisasi 6 kali rapat dari target 6 kali rapat atau 100% dan keputusan yang dihasilkan (outcome) 8 keputusan dari target 8 keputusan atau 100% dan realisasi keuangan Rp 6.811.250,- dari target Rp 12.642.500,- atau 53,88%.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Tokoh/organisasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara langsung ke kantor DPRD sebanyak 6 kali dengan jumlah peserta tidak optimal.

Solusi :

- Anggaran tetap diposting dengan jumlah orang maksimal untuk mengantisipasi penyampaian aspirasi langsung tokoh/organisasi masyarakat ke kantor DPRD Kota Denpasar.

- Sisa Anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2020

**Manfaat dari keputusan ini : adalah sebagai dokumen aspirasi, dan sebagai bahan penyusunan pokok pokok pikiran DPRD dalam perumusan permasalahan pembangunan dan bahan penyusunan RKPD.**

3. **Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan** : realisasi fisik (output) 67 kali rapat dari target 58 kali rapat atau 116% dan keputusan yang dihasilkan (outcome) 58 keputusan dari target 58 keputusan atau 100% dan realisasi keuangan Rp 127.045.000,- dari target Rp 330.803.000,- atau 38,41%.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Kegiatan rapat rapat alat kelengkapan di intern dewan maupun dengan opd teknis jumlah peserta rapat dan waktu tidak optimal sehingga sering tidak diberikan konsumsi, disamping penghematan anggaran.

Solusi :

- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2020.

**Manfaat dari keputusan rapat kerja pengawasan sebagai dokumen pelaksanaan pengawasan Perda, Perkada, dan peraturan perundangan undangan lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan dari BPK.**

4. **Kegiatan rapat – rapat paripurna** : realisasi fisik (output) 25 kali rapat dari target 22 kali rapat atau 114% dan keputusan yang dihasilkan (outcome) 22 keputusan paripurna dari target 22 keputusan atau 100% dan realisasi keuangan Rp 84.423.902,- dari target Rp 279.228.000,- atau 30,23%.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Rapat paripurna kebanyakan sifatnya intern DPRD dengan waktu tidak optimal dan konsumsi tidak terealisasikan disamping penghematan anggaran.

Solusi :

- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2019.

**Manfaat dari Paripurna adalah sebagai keabsahan penetapan Rancangan Peraturan daerah maupun peraturan DPRD maupun keputusan DPRD yang telah dibahas sebelumnya melalui alat alat kelengkapan Dewan**

5. **Kegiatan pelaksanaan Reses** : fisik terealisasi (output) 3 kali reses dari target 3 kali reses atau 100% dan dokumen aspirasi hasil reses pokok pokok

pikiran DPRD (outcome) sebanyak 5 dokumen dari target 5 dokumen atau 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 3.747.406.750,- dari target Rp 3.859.676.000,- atau 97,09%.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Penghematan anggaran.

Solusi :

- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2019.

**Manfaat dokumen Reses : adalah merupakan pokok pokok pikiran DPRD yang di sampaikan ke pemerintah daerah sebagai bahan perumusan permasalahan pembangunan dan bahan penyusunan RKPD.**

- 6. Kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD :** fisik terealisasi (output) 5 kali dari target 5 kali atau 100% dan laporan kunker yang dihasilkan (outcome) 5 dokumen laporan kunker dari target 5 dokumen laporan atau 100% dan realisasi keuangan Rp 507.983.515,- dari target Rp 1.062.235.500,- atau 47,82%.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Dalam kunjungan kerja untuk perbandingan dan promosi potensi daerah keluar negeri yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD kebanyakan dilaksanakan di negara yang lebih dekat, sesuai even promosi pariwisata / potensi daerah yang sesuai dan di butuhkan.

Solusi :

- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2019.

**Manfaat dokumen laporan hasil kunjungan kerja adalah sebagai refrensi/pembanding dalam pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat kerja dengan OPD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.**

- 7. Kegiatan Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD :** realisasi fisik (output) 2 kali bimtek dari target 2 kali atau 100% dan persentase sertifikasi lulus bimtek (outcome) 100% dari target 100% atau 100% dan realisasi keuangan Rp 1.172.098.600,- dari target Rp 1.525.352.000,- atau 76,84%.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Rencana pelaksanaan bimtek diluar daerah belum teralisasi, karena undangan dari pihak ketiga atau kementerian, dalam tahun 2020, berbenturan dengan tugas tugas DPRD yang lebih mendesak yang harus diprioritaskan.

Solusi :

- Di tahun mendatang pelaksanaan bimtek disesuaikan dengan materi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, dan terkait waktu akan diatur secara khusus agar tidak berbenturan dengan tugas tugas dewan lainnya..
- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2020.

**Manfaat Bimbingan teknis adalah untuk meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam meningkatkan kinerja sesuai tugas dan fungsi yang diembannya yaitu pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan.**

- 8. Kegiatan Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan :** realisasi fisik (output) 17 kali kunker dari target 17 kali atau 100% dan laporan hasil kunker (outcome) 17 dokumen laporan hasil kunker dari target 17 dokumen laporan atau 100% dan realisasi keuangan Rp 11.519.531.048,- dari target Rp 14.934.335.723,- atau 77,13%.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Dalam rencana kunjungan kerja untuk konsultasi mencari pembanding oleh Pimpinan dan Anggota DPRD belum direncanakan dari awal daerah tujuan yang dikunjungi, sehingga dalam penganggaran dirancang tujuan Jakarta dan sekitarnya dengan perjalanan selama 3 hari. Dalam pelaksanaan konsultasi sering dikunjungi daerah yang lebih dekat dengan waktu yang sama selama 3 hari sehingga anggaran tersisa, disamping karena penghematan anggaran.

Solusi :

- Kedepan penganggaran perjalanan dinas akan diupayakan lebih awal ditentukan daerah tujuan yang dikunjungi agar anggaran lebih efektif Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2019.

**Manfaat dokumen laporan kunjungan kerja adalah sebagai informasi/pembanding dalam pengambilan keputusan dalam pembahasan dengan OPD teknis di daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.**

- 9. Kegiatan pelaksanaan rapat fraksi :** realisasi fisik (output) 25 kali dari target 25 kali rapat atau 100% dan keputusan yang dihasilkan (outcome) 25 keputusan dari target 25 keputusan atau 100 % dan realisasi keuangan Rp. 261.200.000,- dari target Rp 326.375.000,- atau 80,03%.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Rapat fraksi untuk menyusun pandangan fraksi dalam sidang paripurna, jumlah orang maupun waktu tidak optimal sehingga konsumsi tidak secara optimal terealisasi termasuk alat tulis kantor.

Solusi :

- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2020.

**Manfaat dari keputusan / pandangan fraksi adalah aspirasi politik masing-masing partai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disalurkan di DPRD melalui pandangan umum Fraksi di sidang paripurna**

**10. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas DPRD** : realisasi fisik (output) 4 paket uji lab dari target 4 paket uji lab dan hasilnya tersedianya pakaian dinas (outcome) 4 paket uji lab pakaian dinas DPRD dari target 4 paket uji lab pakaian dinas DPRD atau 100% dan realisasi keuangan Rp 10.510.000,- dari target Rp 30.000.000,- atau 35,03%

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Penawaran lelang maupun pengadaan langsung pakaian dinas DPRD dari pihak ketiga (rekanan) dibawah pagu anggaran

Solusi :

- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2020.

**Manfaat pakaian dinas DPRD adalah untuk meningkatkan disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.**

Faktor keberhasilan pencapaian program ini adalah:

- a. Tersedianya anggaran yang cukup untuk masing-masing kegiatan
- b. Adanya keharmonisan dan sinergi antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Sekretariat dalam melaksanakan tugas.
- c. Adanya Peraturan Tata Tertib DPRD.

Hambatan/masalah:

- a. Jadwal kegiatan DPRD terlalu padat sehingga jadwal kunjungan kerja dan bimtek sering berbenturan dengan kegiatan yang lain.
- b. SPJ untuk kegiatan reses sering terlambat dampaknya mengganggu pencairan dana untuk keperluan kegiatan yang lain di bulan berikutnya.
- c. Belum direkrutnya kolompok ahli atau kelompok pakar untuk meningkatkan kinerja alat kelengkapan DPRD.

Pemecahan masalah:

- a. Badan musyawarah dalam penjadwalan kegiatan per bulannya berupaya berkordinasi lebih intensif dengan berbagai pihak, untuk meminimalisir benturan dalam pelaksanaan tugas..
- b. Mengupayakan segera mungkin untuk merekrut kelompok ahli/pakar untuk meningkatkan kinerja alat alat kelengkapan DPRD.
- c. PPTK berupaya terus menerus menginformasikan mekanisma pengelolaan keuangan kepada DPRD agar SPJ pelaksanaan Reses bisa disetor tepat waktu di Sekretariat untuk memperlancar pengamprahan anggaran bulan berikutnya.

**Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran :**

1. **Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran** : realisasi fisik (output) 100% dari target 100% atau 100% dan persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (outcome) 100% dari target 100% atau 100% dan realisasi keuangan Rp 2.939.380.932,- dari target Rp 3.433.323.640,- atau 85,61%.

Anggaran tersisa disebabkan karena : Penghematan anggaran.

Solusi :

- Sisa anggaran di setorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2020

**Manfaat Administrasi Perkantoran adalah untuk memperlancar tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD.**

2. **Kegiatan Pelayanan humas dan keprotokolan** : realisasi fisik (output) 100% dari target pelayanan 100% dan persentase optimalnya humas keprotokolan (outcome) 100% dari target 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 115.362.500,- dari target Rp 436.150.000,- atau 26,45%.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Konsumsi dan plakat yang disiapkan untuk tamu luar daerah yang datang ke DPRD Kota Denpasar untuk konsultasi di tahun 2020 tidak optimal sesuai dengan jumlah yang di perkirakan / targetkan, disamping penghematan penggunaan anggaran.

Solusi :

- sisa anggaran di setorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2020

**Manfaat pelayanan humas dan keprotokolan ini adalah untuk memfasilitasi DPRD dalam melaksanakan tugas tugas serimonial dan penerimaan tamu kunjungan kerja dari luar daerah.**

Faktor keberhasilan pencapaian program ini adalah :

- a. Tersedianya anggaran di masing-masing kegiatan.

- b. Adanya harmonisasi dan sinergi antara DPRD dan Sekretariat dalam melaksanakan tugas.

Hambatan/masalah:

Kualitas SDM ASN di masing masing bagian belum optimal sesuai yang dibutuhkan.

Pemecahan masalah :

- a. Mengoptimalkan pemberian arahan dan petunjuk kepada ASN.
- b. Mengikutsertakan kursus-kursus di bidang pengadaan barang dan jasa, legal drafting, Sakip/LKjIP dan humas keprotokolan.

**Program : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur**

1. **Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur** : realisasi fisik (output) 100% dari target 100% atau 100% dan persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (outcome) 100% dari target 100% dan realisasi keuangan Rp 938.061.404,- dari target Rp 1.189.822.900 atau 78,84%.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

- Adanya efisiensi/penghematan pemeliharaan kendaraan seperti suku cadang karena kendaraan dinas jabatan maupun operasional kebanyakan masih baru, minim kerusakan termasuk pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan gedung.kantor.
- Operasional kendaraan dinas, komisi maupun Sekretariat intensitas ke lapangan tidak optimal sehingga penggunaan BBM untuk kendaraan dinas operasional anggarannya tersisa.
- Penawaran pihak ketiga rekanan lelang maupun pengadaan langsung belanja modal dibawah pagu anggaran.

Solusi :

- Kedepan penganggaran diupayakan lebih efektif berdasarkan survey lapangan sesuai kebutuhan barang,agar lebih efisien.
- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2020.

**Manfaat pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah untuk memperlancar tugas dan fungsi DPRD.**

Faktor keberhasilan pencapaian program ini adalah :

- a. Tersedianya anggaran yang cukup.
- b. Adanya beberapa ASN yang lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hambatan/masalah:

- a. Minimnya ASN yang bersertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b. Belum optimalnya pemahaman terkait serapan anggaran kas yang telah terposting.setiap bulannya.

Pemecahan masalah:

- a. Mengikut sertakan ASN Sekretariat DPRD dalam ujian sertifikasi barang dan jasa.
- b. Merealisasikan pengadaan barang maupun pemeliharaan sesuai anggaran kas yang telah di rancang setiap bulan.

**Program : Kursus , pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis**

1. **Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal** : (Output) realisasi fisik 1 dok dari target 1 dok atau 100% dan ASN yang lulus bimtek (outcam) 1 ok dari target 1 ok atau 100%. Realiasi Keuangan Rp 73.422.910,- dari target keuangan Rp 96.000.000,- atau 76,48%.

Anggaran tersisa disebabkan karena :

Ini disebabkan karena pendampingan bimtek DPRD dari ASN tidak terlaksana dari karena DPRD dalam tahun 2020 Cuma melaksanakan bimtek orientasi di dalam daerah dan bimtek pendalaman diluar daerah tidak terlaksana karena benturan dengan tugas lain karena baru dilantik.

Solusi :

- Sisa Anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun anggaran 2020

**Manfaat bimtek ASN adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam mendukung peningkatan kinerja DPRD.**

Faktor keberhasilan pencapaian program ini adalah :

- a. Tersedianya anggaran yang cukup.
- b. Adanya koordinasi yang baik dengan pihak ketiga penyelenggara bimtek.

Hambatan/masalah:

- a. Penawaran yang dari dari lembaga penyelenggara diklat/bimtek scedulnya benturan dengan tugas lain yang diberikan oleh DPRD.
- b. Minimnya penawaran pelaksanaan bimtek sehingga sulit memilih scedul agar sinergi dengan waktu yang ada untuk bimtek.

Pemecahan masalah:

- a. Diupayakan kordinasi terlebih dahulu dengan penyelenggara dan pengiriman ASN untuk mengikuti bimtek lebih selektif utamanya pejabat eselon dan staf teknis yang ada kaitannya dengan materi yang dibutuhkan.
- b. Meningkatkan koordinasi antar bagian untuk penentuan pesertanya.

**Program : Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan.**

**1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi**

**keuangan** : (output) realisasi fisik 100% dari target 100% atau 100% dan laporan keuangan tepat waktu (outcome) 100% dari target 100% dan keuangan terealisasi Rp 20.396.250,- dari target 21.962.500,- atau 92,87%.

Anggaran tersisa disebabkan karena : Penghematan anggaran.

Solusi :

- Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2020

**Manfaat dokumen laporan ini adalah sebagai akuntabilitas penggunaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.**

Faktor keberhasilan pencapaian program ini adalah :

- a. Tersedianya anggaran yang cukup.
- b. Adanya koordinasi yang baik dengan para PPTK di lingkungan Sekretariat DPRD.

Hambatan/masalah:

Belum optimalnya pemahaman dewan tentang mekanisme pengelolaan keuangan, menyebabkan terlambatnya perampungan SPJ.

Pemecahan masalah:

- a. PPTK berupaya secara intensif komunikasi dengan DPRD terkait mekanisme pengelolaan keuangan. agar pertanggung jawaban bisa segera disetorkan ke sekretariat.
- b. Mengupayakan pelaporan setiap bulan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan..
- c. Dana yang dianggarkan dan realisasi masing-masing program kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

**Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.**

**Program/kegiatan :**

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
  - Alokasi anggaran : Rp. 4.512.064.000,-
  - Realisasi : Rp. 3.101.405.229,- atau 68,74%
  - Efektivitas kinerja : 100 %
2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat/ tokoh agama.
  - Alokasi anggaran : Rp. 12.642.500,-
  - Realisasi : Rp. 6.811.250,- atau 53,88%
  - Efektivitas kinerja : 100 %
3. Rapat rapat alat kelengkapan dewan
  - Alokasi anggaran : Rp. 330.803.000,-
  - Realisasi : Rp. 127.045.000,- atau 38,41%
  - Efektivitas kinerja : 100 %
4. Rapat rapat paripurna
  - Alokasi anggaran : Rp. 279.228.000,-
  - Realisasi : Rp. 84.423.902,- atau 30,23%
  - Efektivitas kinerja : 100 %
5. Pelaksanaan Reses
  - Alokasi anggaran : Rp 3.859.676.000,-
  - Realisasi : Rp. 3.747.406.750,- atau 97,09%
  - Efektivitas kinerja : 100 %
6. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
  - Alokasi anggaran : Rp. 1.062.235.500,-
  - Realisasi : Rp. 507.983.515,- atau 47,82%
  - Efektivitas kinerja : 100 %
7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
  - Alokasi anggaran : Rp. 1.525.352.000,-
  - Realisasi : Rp. 1.172.098.600,- atau 76,84%
  - Efektivitas kinerja : 100 %
8. Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan DPRD
  - Alokasi anggaran : Rp. 14.934.335.723,-
  - Realisasi : Rp. 11.519.531.048,- atau 77,13%
  - Efektivitas kinerja : 100 %
9. Kegiatan Pelaksanaan rapat Fraksi
  - Alokasi anggaran : Rp. 318.276.500,-

Realisasi : Rp. 310.696.250,- atau 97,62%

Efektivitas kinerja : 100 %

10. Pengadaan pakaian dinas DPRD

Alokasi dana : Rp. 30.000.000,-

Realisasi : Rp. 10.510.000,- atau 35,03%

Efektivitas kinerja : 100 %

**Program/kegiatan :**

1. Pelayanan administrasi perkantoran

Alokasi dana : Rp. 3.433.323.640,-

Realisasi : Rp. 2.939.380.932 atau 85,61%

Efektivitas kinerja : 100 %

2. Pelayanan humas keprotokolan

Alokasi dana : Rp. 436.150.000,-

Realisasi : Rp. 115.362.500,- atau 26,45%

Efektivitas kinerja : 100 %

**Program/kegiatan :**

1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Alokasi dana : Rp. 1.189.822.900,-

Realisasi : Rp. 938.061.404,- atau 78,84%

Efektivitas kinerja : 100 %

**Program/kegiatan :**

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Alokasi dana : Rp. 96.000.000,-

Realisasi : Rp. 73.422.910,- atau 76,48%

Efektivitas kinerja : 100 %

**Program/kegiatan :**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan

Alokasi dana : Rp. 21.962.500,-

Realisasi : Rp. 20.396.250,- atau 92,87%

Efektivitas kinerja : 100 %

**Tabel 2.1.**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD S/D TAHUN 2021 KOTA DENPASAR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target kinerja capaian program tahun Renstra	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun. 2019 (n-2)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan. tahun lalu 2019 (n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021 (n)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Setwan s/d tahun berjalan	
					Target RENJA tahun 2020 (n-1)	Realisasi RENJA tahun 2020 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d 2021 (n)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
1.20	Urusan Wajib Pemerintahan Umum									
1.20.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah									
4.00.02.01.15	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									
4.00.02.01.15.01	1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	Output Jumlah rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100 kali	149 kali	45 kali	45 kali	100	20 kali	214 kali	214
		Outcome Tersedianya perda	75 perda	40 perda	8 perda	8 perda	100	5 perda	53 perda	70,6
4.00.02.01.15.02	2. Hearing / Dialog Dan Kordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	Output Jumlah hearing/Dialog/Koordinasi	15 kali	30 kali	6 kali	6 kali	100	3 kali	39 kali	260
		Outcome Jumlah tersedianya keputusan hearing DPRD	15 kep	30 kep	8 kep	8 kep	100	3 kep	41 kep	273,3
4.00.02.01.15.03	3. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Output Jumlah rapat rapat Alat Kelengkapan Dewan	110 kali	222 kali	58 kali	67 kali	116	22 kali	311 kali	282,7
		Outcome Jumlah tersedianya keputusan rapat rapat alat kelengkapan dewan	90 kep	78 kep	18 kep	18 kep	100	18 kep	114 kep	126,6

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target kinerja capaian program tahun Renstra	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun. 2019 (n-2)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan. tahun lalu 2019 (n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021 (n)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Setwan s/d tahun berjalan	
					Target RENJA tahun 2020 (n-1)	Realisasi RENJA tahun 2020 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d 2021 (n)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
4.00.02.01.15.04	4. Rapat-Rapat Paripurna	<u>Output</u> Jumlah Rapat Paripurna DPRD	60 kali	70 kali	22 kali	25 kali	114	14 kali	109 kali	181,6
		<u>Outcome</u> Jumlah tersedianya keputusan paripurna DPRD	60 kep	60 kep	22 kep	22 kep	100	14 kep	96 kep	160
4.00.02.01.15.05	5. Kegiatan Reses	<u>Output</u> Jumlah Komunikasi dan Konsultasi Dengan Konstituennya di Daerah Pemilihan	15 kali	11 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali	17 kali	113,3
		<u>Outcome</u> Tersedianya dokumen aspirasi masyarakat konstituen/ pokok pokok pikiran DPRD	15 dok	11 dok	3 dok	3 dok	100	3 dok	17 dok	113,3
4.00.02.01.15.06	6. Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD.	<u>Output</u> Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	65 kali	36 kali	5 kali	5 kali	100	13 kali	54 kali	83
		<u>Outcome</u> Jumlah tersedianya laporan hasil kunjungan kerja sebagai bahan pembandingan dalam pengambilan keputusan	65 dok	36 dok	5 dok	5 dok	100	13 dok	54 dok	83
4.00.02.01.15.07	7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD / Bimbingan Teknis	<u>Output</u> Jumlah Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD	10 kali	3 kali	2 kali	2 kali	100	2 kali	7 kali	70
		<u>Outcome</u> Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang bimtek	100%	125%	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target kinerja capaian program tahun Renstra	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun. 2019 (n-2)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan. tahun lalu 2019 (n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021 (n)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Setwan s/d tahun berjalan	
					Target RENJA tahun 2020 (n-1)	Realisasi RENJA tahun 2020 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d 2021 (n)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
4.00.02.01.15.09	8. Kunjungan Kerja Untuk Peningkatan Wawasan Alat Alat Kelengkapan Dewan	<u>Output</u> Jumlah kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD	95 kali	87 kali	17 kali	17 kali	100	24 kali	128 kali	134,7
		<u>Outcome</u> Jumlah tersedianya Laporan hasil kunjungan kerja sebagai pembanding dalam pengambilan keputusan	95 dok	87 dok	17 dok	17 dok	100	24 dok	128 dok	134,7
4.00.02.01.15.10	9. Kegiatan Fraksi	<u>Output</u> Jumlah rapat Fraksi	125 kali	85 kali	25 kali	25 kali	100	25 kali	135 kali	108
		<u>Outcome</u> Jumlah tersedianya Keputusan Fraksi	125 dok	85 kali	25 dok	25 dok	100	25 kep	135 kali	108
4.00.02.01.15.11	10. Pengadaan Pakaian Dinas DPRD.	<u>Output</u> Jumlah pengadaan pakaian Dinas DPRD	1.080 stel	900 stel	4 paket uji lab	4 paket uji lab	100	225 stel	1.129 stel	105,5
		<u>Outcome</u> Jumlah tersedianya pakaian dinas DPRD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
<b>4.00.02.01.01</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
4.00.02.01.01.19	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	<u>Output</u> Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		<u>Outcome</u> Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
4.00.02.01.01.2	2. Pelayanan Humas dan Keprotokolan	<u>Output</u> Persentase Pelayanan Humas dan Keprotokolan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		<u>Persentase humas dan keprotokolan</u> Persentase optimalnya pelayanan humas dan keprotokolan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target kinerja capaian program tahun Renstra	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun. 2019 (n-2)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan. tahun lalu 2019 (n-1)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021 (n)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra Setwan s/d tahun berjalan	
					Target RENJA tahun 2020 (n-1)	Realisasi RENJA tahun 2020 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d 2021 (n)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
<b>4.00.02.01.02</b>	<b>Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>									
4.00.02.01.02.11	1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<u>Outcome</u> Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		<u>Output</u> Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
<b>4.00.02.01.05</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									
4.00.02.01.05.01	1.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	<u>Output</u> Jumlah ASN bimbingan Teknis.	13 ok	17 ok	1 ok	1 ok	100	27 ok	42 ok	323
		<u>Outcome</u> Persentase ASN bimbingan teknis	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
<b>3.00.03.01.18</b>	<b>Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>									
3.00.03.01.18.01	1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	<u>Output</u> Jumlah/persentase penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		<u>Outcome</u> Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	15 dok	12 ok				3 dok	15 dok	100%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas : menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Tabel 2.2

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	- Jumlah rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - Tersedianya Perda			20 Kali 1 Perda.	20 Kali 15 Perda.	20 Kali 15 Perda.	20 Kali 15 Perda.	40 Kali 6 Perda.	46 Kali 13 Perda.	20 Kali 5 Perda.	20 Kali 5 Perda.	
2	- Jumlah hearing/Dialog/Koordinasi - Tersedianya keputusan hearing DPRD			3 Kali 3 Kep	3 Kali 3 Kep	3 Kali 3 Kep	3 Kali 3 Kep	16 Kali 16 Kep	9 Kali 9 Kep	3 Kali 3 Kep	3 Kali 3 Kep	
3	- Jumlah rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan - Tersedianya keputusan rapat alat kelengkapan DPRD			22 Kali 18 Kep	22 Kali 18 Kep	22 Kali 18 Kep	22 Kali 18 Kep	32 Kali 23 Kep	67 Kali 18 Kep	22 Kali 18 Kep	22 Kali 18 Kep	
4	- Jumlah rapat Rapat Paripurna DPRD - Tersedianya keputusan paripurna DPRD			12 Kali 12 kep	12 Kali 12 kep	12 Kali 12 kep	12 Kali 12 kep	12 Kali 12 kep	25 Kali 25 kep	12 Kali 12 kep	12 Kali 12 kep	
5	- Jumlah Komunikasi Dan Konsultasi Dengan Konstituennya Di Daerah Pemilihan - tersedianya dokumen aspirasi masyarakat			3 Kali 3 Dok	3 Kali 3 Dok	3 Kali 3 Dok	3 Kali 3 Dok	3 Kali 3 Dok	2 Kali 2 Dok	3 Kali 3 Dok	3 Kali 3 Dok	

	konstituen											
6	- Jumlah kunker Pimpinan dan Anggota DPRD - Jumlah tersedianya dokumen laporan hasil kunjungan kerja sebagai bahan pembandingan untuk pengambilan keputusan			13 kali 13 Dok	13 kali 13 Dok	13 kali 13 Dok	13 kali 13 Dok	7 kali 7 Dok	13 kali 13 Dok	13 kali 13 Dok	13 kali 13 Dok	
7	- Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD bimtek - Persentase DPRD Bimtek			2 Kali 100%	2 Kali 100%	2 Kali 100%	2 Kali 100%	1 Kali 50 %	1 Kali 50 %	2 Kali 100%	2 Kali 100%	
8	- Jumlah kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD - Jumlah tersedianya dokumen Laporan hazel kunjungan kerja sebagai pembandingan untuk pengambilan keputusan			19 kali 19 Dok	19 kali 19 Dok	19 kali 19 Dok	19 kali 19 Dok	25 kali 25 Dok	27 kali 27 Dok	24 kali 24 Dok	24 kali 24 Dok	
9	- Jumlah rapat Fraksi - Jumlah tersedianya Keputusan Fraksi			25 Kali 25 kep	25 Kali 25 kep	25 Kali 25 kep	25 Kali 25 kep	15 Kali 15 kep	25 Kali 25 kep	30 Kali 30 kep	30 Kali 30 kep	
10	- Jumlah pengadaan pakaian Dinas DPRD - Jumlah tersedianya pakaian dinas DPRD			225 Stel 100 %	270 Stel 100 %	225 Stel 100 %	225 Stel 100 %	270 Stel 100 %	270 Stel 100 %	225 Stel 100 %	225 Stel 100 %	
11	- Jumlah aktivitas kegiatan dalam Rangka Hut Kota Denpasar - Persentase partisipasi DPRD dan Sekretariat dalam peringatan Hut Kota Denpasar			1 kali 100%	1 kali 100%	1 kali 100%	1 kali 100%	1 kali 100%	1 kali 100%			
12	- Persentase pelayanan administrasi perkantoran			100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	

	- Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran											
13	- Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan - Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan			100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
14	- Jumlah penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA dan LKjIP - Jumlah tersedianya Dokumen, Renja, RKA, DPA dan LKjIP.			6 Dok 6 Dok	6 Dok 6 Dok	6 Dok 6 Dok	6 Dok 6 Dok	6 Dok 6 Dok	6 Dok 6 Dok	6 Dok 6 Dok	6 Dok 6 Dok	
15	- Persentase pelayanan Humas dan Keprotokolan - Persentase pelayanan humas dan keprotokolan			100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	50 % 50 %	100% 100%	100% 100%	
16	- Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. - Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
17	- jumlah ASN yang mengikuti Bimtek. - Persentase ASN Bimtek			9 ok 100%	9 ok 100%	9 ok 100%	9 ok 100%	2 ok 50 %	15 ok 34,88%	27 ok 100%	2 ok 100%	
18	- Jumlah penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan. - Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu			100% 3 dok	100% 3 dok	100% 3 dok	100% 3 dok	100% 3 dok	100% 3 dok	100% 3 dok	100% 3 dok	

## **2.3 Isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.**

### **a. Isu-Isu penting**

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Walikota Denpasar terpilih pada Tahun 2016-2021, Sekretariat DPRD Kota Denpasar sesuai tupoksi telah dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya : penyusunan program Pembentukan Perda, pembahasan rancangan Perda dan usul rancangan Perda inisiatif DPRD.
2. Belum optimalnya : pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plapon anggaran sementara berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pembahasan rancangan Perda tentang APBD, pembahasan rancangan perda tentang Perubahan APBD dan pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
3. Belum optimalnya pengawasan : Perda dan Peraturan kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang undangan yang lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Belum optimalnya serapan aspirasi masyarakat konstituen untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang merupakan pokok pokok pikiran DPRD dalam perumusan permasalahan pembangunan dan bahan penyusunan RKPD

### **b. Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.**

Dalam memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD sebagaimana diamanahkan dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah tidak bisa dipisahkan dari Pelayanan Lembaga Sekretariat Dewan.

Tuntutan pelayanan yang profesional dan kreatif serta berdasarkan ketentuan yang ada sebagai salah satu bentuk dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD menjadi sangat penting.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan kinerja Pimpinan dan Anggota yang optimal sesuai target yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2016-2021, maka yang harus diwujudkan dalam renja 2020 ini adalah:

- Fasilitasi perencanaan jadwal rapat sidang yang efektif dan fasilitasi koordinasi ke berbagai pihak termasuk Pemda optimal.
- Kapasitas pemahaman peraturan tata tertib DPRD secara optimal dan kualitas SDM yang memadai.
- Ketersediaan kajian akademik/bahan rapat/ Raperda optimal dan memadai, perekrutan kelompok ahli/kelompok pakar alat-alat kelengkapan DPRD dan perlu adanya kerja sama dengan pihak lain/ perguruan tinggi
- Refrensi pembanding cukup memadai dan peran pendamping ASN dalam Kunker DPRD cukup optimal
- Ketersediaan pokok pokok pikiran DPRD optimal, aspirasi masyarakat terserap secara optimal dalam reses, fasilitasi dalam pelaksanaan reses optimal dan adanya pendamping dalam pelaksanaan reses DPRD.
- Evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan belum optimal dan kemampuan evaluasi belum memadai.

**c. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional**

Apabila isu-isu strategis yang ada melalui strategi-strategi dan arah kebijakan yang dipersiapkan mampu dipenuhi dan berjalan dengan baik dalam mengatasi segala hambatan dan permasalahan yang ada, maka capaian visi dan misi kepala daerah, dan capaian program nasional oleh opd teknis yang bersinergi dalam pelaksanaannya dengan tupoksi dewan tentunya akan tercapai dengan baik, oleh karenanya dibutuhkan komitmen dari pihak-pihak yang berkompeten untuk mensukseskannya.

**d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar**

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi terdiri atas dua faktor strategis, yaitu

peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threat). Identifikasi terhadap lingkungan strategis Sekretariat

### **Faktor Internal**

Di dalam lingkungan internal terdapat dua faktor penting yang berpengaruh, yaitu faktor yang berkaitan dengan strengths ,kekuatan, dan faktor yang berkaitan dengan weaknes ,kelemahan,

#### **1. Kekuatan**

Sekretariat Daerah Kota Denpasar memiliki potensi yang berfungsi sebagai kekuatan :

- a) Tersedianya anggaran yang cukup memadai, pendanaan dalam melaksanakan kegiatan ditetapkan melalui APBD Kota Denpasar baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung.
- b) Tersedianya sarana dan prasarana, dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas seperti peralatan kantor, mobilitas, gedung, taman. halaman parkir dan lainnya.
- c) Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD yang mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- d) Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.

#### **2. Kelemahan**

- a) Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal. terbatasnya kualitas pendidikan perlu ditingkatkan karena tuntutan kebutuhan organisasi sangat diperlukan peningkatan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia. Hal ini berimplikasi terhadap lemahnya produk produk hukum yang harus dihasilkan begitu pula tanggapan seperti pembuatan pandangan umum, dan laporan lainnya yang dideskripsikan oleh pihak Sekretariat DPRD.
- b) Belum optimalnya ketersediaan kelompok pakar/tim ahli dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas dan wewenang DPRD.

### **Faktor Eksternal**

Di dalam lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor penting yang berpengaruh, yaitu faktor yang berkaitan dengan opportunities ; peluang. maupun threat ;tantangan.

## **1. Peluang**

Banyaknya tokoh yang berpengaruh di Kota Denpasar dipresentasikan dengan keberadaan lembaga DPRD sebagai wujud konstelasi politik maupun kelompok kelompok masyarakat. Realita ini merupakan potensi yang cukup besar ketika dikaitkan dengan pembangunan di daerah. Manakala terdapat sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan tokoh tokoh masyarakat itu, proses pembangunan akan lebih mudah dilakukan :

- a) Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
- b) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
- c) Pemanfaatan tenaga ahli dalam menunjang tugas tugas Dewan
- d) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya;

## **2. Tantangan**

- a) Masyarakat di Kota Denpasar tergolong heterogen dan perlu diakomodir dalam proses politik di DPRD.
- b) Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan undangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sesuai UU Nomer 25 tahun 2004 dan Permendageri Nomer 86 tahun 2017, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar disusun dengan mempedomani Renstra dan RKPD Kota Denpasar.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan RKPD Kota Denpasar. Dalam Rancangan RKPD Kota Denpasar tahun 2022 ditetapkan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu 2 Program dan 15 Kegiatan dengan 43 Sub kegiatan dan anggaran direview menjadi Rp 97.728.412.938.



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>25.765.000</b>	<b>Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD	100%	<b>Rp16,062,266</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Jumlah penyusunan renstra dan renja	2 Dok	25.765.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	Rp16,062,266
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>52.162.837.767</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	<b>100%</b>	<b>Rp7,901,897,122</b>
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Presentase Gaji dan Tunjangan ASN	100%	52.081.048.915	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Utara,	Jumlah dokumen administrasi keuangan	24 dokumen	Rp7,901,897,122

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Presentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD	100%			Dangin Puri Kangin	yang diselesaikan		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Denpasar	Presentase pelaksanaan administrasi tugas asn	100%	81.788.852					
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.466.196.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100%	<b>Rp1,685,928,470</b>
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Denpasar	Presentase Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	230.687.940	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp192,448,470
4	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Denpasar	Presentase Penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia	100%	125.911.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100%	Rp74,367,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Denpasar	Presentase Penyediaan bahan logistik kantor	100%	272.368.060	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	persentase penyediaan bahan logistik kantor	100%	Rp222,760,000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Denpasar	Presentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	82.210.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Rp36,560,000
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Denpasar	Presentase Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	698.744.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Rp674,544,000
8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Denpasar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	12 kali	56.275.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Denpasar dan Luar Kota	jumlah rapat konsultasi dan koordinasi	12 Kali	Rp674,544,000
	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>				<b>546.000.000</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		Persentase penyediaan jasa pelayanan penunjang kantor yang	100%	<b>Rp2,428,902,384</b>

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								selesai dengan baik dan berkualitas		
9	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar	Presentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	100%	546.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	100%	Rp600,000,000
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 jasa	Rp1,828,902,384
	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>				<b>1.887.189.805</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp1,828,902,384
11	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya	Kota Denpasar	Presentase pemeliharaan mobil	100%	438.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya	Kota Denpasar, Denpasar	Persentase pemeliharaan kendaraan	100%	Rp381,500,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		jabatan			pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Utara, Dangin Puri Kangin	dinas jabatan		
12	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Denpasar	Presentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100%	417.160.000	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100%	Rp326,860,000
13	Pemeliharaan mebel	Kota Denpasar	Presentase pemeliharaan mebel	100%	50.150.000	Pemeliharaan mebel	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	persentase pemeliharaan mebel	100%	Rp326,860,000
14	Pemeliharaan asset tetap lainnya	Kota Denpasar	Presentase pemeliharaan asset tetap lainnya	100%	441.179.805	Pemeliharaan asset tetap lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	persentase pemeliharaan aset tetap lainnya	100%	Rp139,400,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Denpasar	Presentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	540.700.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	Rp139,400,000
	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>				<b>586.664.500</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		Persentase pencapaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100%	<b>Rp469,302,000</b>
16	Fasilitasi keprotokolan	Kota Denpasar	Presentase fasilitasi keprotokolan	100%	586.664.500	Fasilitasi keprotokolan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	persentase fasilitasi Keprotokolan	100%	Rp469,302,000
	<b>Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>				<b>445.344.922</b>	<b>Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>		Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100%	<b>Rp47,904,483,826</b>

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Kota Denpasar	presentase penyelenggaraan administrasi keuangan	100%	66.614.922	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu	50 dokumen	Rp47,144,998,826
18	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Kota Denpasar	Jumlah pengadaan pakaian dinas DPRD	225 stel	277.310.000	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah pengadaan pakaian dinas DPRD	45 orang	Rp659,810,000
19	Pelaksanaan medical check Up DPRD	Kota Denpasar	Jumlah pelaksanaan medical check up DPRD	45 orang	101.420.000	Pelaksanaan medical check Up DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah pelaksanaan medical chek up DPRD	45 orang	Rp99,675,000
	<b>Layanan administrasi DPRD</b>				<b>356.084.500</b>	<b>Layanan administrasi DPRD</b>		Persentase layanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100%	<b>Rp350,354,700</b>
20	Fasilitasi Fraksi	Kota	Jumlah rapat	25 kali	53.297.500	Fasilitasi Fraksi	Kota	jumlah rapat	25 kali	Rp76,359,700

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DPRD	denpasar	fraksi			DPRD	Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	fraksi		
21	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Kota denpasar	Jumlah rapat rapat DPRD	12 kali	302.787.000	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	jumlah rapat rapat DPRD	12 kali	Rp76,359,700
	<b>Progam Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>				<b>23.464.001.420</b>	<b>Progam Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>		<b>1. Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu 2. Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD</b>	<b>100%</b> <b>85%</b>	<b>Rp35,864,972,170</b>
	<b>Pembentukan peraturan daerah dan</b>				<b>4.404.619.550</b>	<b>Pembentukan peraturan daerah dan</b>		Persentase tersedianya pembentuka	100%	<b>Rp4,186,864,700</b>

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>peraturan DPRD</b>					<b>peraturan DPRD</b>		n Perda dan Peraturan DPRD tepat waktu		
22	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Kota Denpasar	Jumlah rapat bapemperda	12 kali	308.155.550	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Kota Denpasar dan Luar Kota	jumlah rapat bapemperda	12 kali	Rp273,544,000
23	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Kota Denpasar	Jumlah pembahasan ranperda	24 kali	3.803.089.000	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Kota Denpasar dan Luar Kota	jumlah pembahasan ranperda	24 kali	Rp3,761,820,700
24	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Kota Denpasar	Jumlah penyusunan naskah akademik	3 buah	293.375.000	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Kota Denpasar	jumlah penyusunan naskah akademik	3 buah	Rp151,500,000
	<b>Pembahasan kebijakan anggaran</b>				<b>864.379.540</b>	<b>Pembahasan kebijakan anggaran</b>		Persentase penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	100%	<b>Rp564,106,000</b>
25	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Denpasar	Jumlah rapat KUA dan PPAS	8 kali	789.450.800	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Denpasar dan Luar	jumlah rapat KUA dan PPAS	5 kali	Rp529,906,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kota			
26	Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Denpasar	Jumlah rapat pembahasan perubahan KUA dan PPAS	8 kali	10.370.000	Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Denpasar	jumlah rapat pembahasan perubahan KUA dan PPAS	8 kali	Rp8,550,000
27	Pembahasan APBD	Kota Denpasar	Jumlah pembahasan APBD	22 kali	39.643.420	Pembahasan APBD	Kota Denpasar	jumlah pembahasan APBD	8 kali	Rp8,550,000
28	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Denpasar	Jumlah pembahasan APBD perubahan	8 kali	11.490.300	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Denpasar	jumlah pembahasan APBD perubahan	8 kali	Rp8,550,000
29	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	Kota Denpasar	Jumlah rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD	8 kali	13.425.020	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	Kota Denpasar	jumlah rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD	5 kali	Rp8,550,000
	<b>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan</b>				<b>11.366.744.000</b>	<b>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan</b>		Persentase penyelenggaraan pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD	100%	<b>Rp15,941,196,000</b>

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan hukum	Kota Denpasar	Jumlah rapat pengawasan bidang hukum	12 kali	2.789.522.000	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan hukum	Kota Denpasar dan Luar Kota	jumlah rapat pengawasan bidang hukum	4 kali	Rp3,912,822,000
31	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Kota Denpasar	Jumlah rapat pengawasan infrastruktur	12 kali	2.982.148.000	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Kota Denpasar dan Luar Kota	jumlah rapat pengawasan infrastruktur	4 kali	Rp4,173,190,000
32	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Kota Denpasar	Jumlah rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	12 kali	2.971.248.000	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Kota Denpasar dan Luar Kota	jumlah rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	4 kali	Rp4,154,690,000
33	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Kota Denpasar	Jumlah rapat pengawasan bidang perekonomian	12 kali	2.588.626.000	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Kota Denpasar dan Luar Kota	jumlah rapat pengawasan bidang perekonomian	4 kali	Rp3,642,694,000
34	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa	Kota Denpasar	Jumlah rapat pengawasan tindak lanjut BPK	6 kali	4.750.000	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa	Kota Denpasar	jumlah rapat pengawasan tindak lanjut BPK	2 kali	Rp3,642,694,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	keuangan					keuangan				
35	Pengawasan Pengguna Anggaran	Kota Denpasar	Jumlah rapat pengawsan anggaran	6 kali	30.450.000	Pengawasan Pengguna Anggaran	Kota Denpasar	jumlah rapat pengawasan anggaran	2 kali	Rp53,900,000
	<b>Peningkatan kapasitas DPRD</b>				<b>3.013.679.100</b>	<b>Peningkatan kapasitas DPRD</b>		Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	100%	<b>Rp6,323,850,000</b>
36	Bimbingan teknis DPRD	Kota Denpasar	Jumlah bimtek pimpinan dan anggota DPRD	2 kali	1.679.134.800	Bimbingan teknis DPRD	Kota Denpasar dan Luar Kota	jumlah bimtek pimpinan dan anggota DPRD	6 kali	Rp5,022,408,000
37	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Kota Denpasar	Jumlah pengangkatan kelompok pakar/tim ahli	2 orang	300.025.000	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Kota Denpasar	jumlah pengangkatan kelompok pakar/tim ahli	2 orang	Rp5,022,408,000
38	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Kota Denpasar	Jumlah pengangkatan tenaga ahli fraksi	5 orang	325.121.300	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Kota Denpasar	jumlah pengangkatan tenaga ahli fraksi	5 orang	Rp5,022,408,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Kota Denpasar	Jumlah rapat hearing dan dialog dengan masyarakat 3 kali	12 kali	11.731.000	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Kota Denpasar	jumlah rapat hearing dan dialog dengan masyarakat 3 kali	12 kali	Rp7,920,000
40	Penyusunan Progam Kerja DPRD	Kota Denpasar	Jumlah penyusunan progam kerja DPRD	12 kali	697.667.000	Penyusunan Progam Kerja DPRD	Kota Denpasar dan Luar Kota	jumlah penyusunan progam kerja DPRD	12 kali	Rp693,522,000
	<b>Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat</b>				<b>2.334.254.230</b>	<b>Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat</b>		Persentase pelaksanaan reses tepat waktu	100%	<b>Rp2,317,762,470</b>
41	Pelaksanaan reses	Kota Denpasar	Jumlah pelaksanaan reses	3 kali	2.334.254.230	Pelaksanaan reses	Kota Denpasar	jumlah pelaksanaan reses	2 kali	<b>Rp2,317,762,470</b>
	<b>Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD</b>				<b>121.165.000</b>	<b>Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD</b>		Persentase tercapainya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%	<b>Rp120,970,000</b>
42	Pengawasan kode etik DPRD	Kota Denpasar	Jumlah rapat kode etik	12 kali	121.165.000	Pengawasan kode etik DPRD	Kota Denpasar dan Luar	jumlah rapat kode etik	12 kali	Rp120,970,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kota			
	<b>Fasilitasi tugas DPRD</b>				<b>1.359.160.000</b>	<b>Fasilitasi tugas DPRD</b>		Persentase tercapainya penyelenggaraan fasilitas tugas DPRD	100%	<b>Rp6,410,223,000</b>
43	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Kota denpasar	Jumlah koordinasi dan konsultasi pimpinan DPRD	12 kali	1.359.160.000	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Kota Denpasar , Luar Kota dan Luar Negeri	jumlah koordinasi dan konsultasi pimpinan DPRD	12 kali	Rp6,410,223,000
<b>TOTAL</b>					<b>80.940.083.414</b>					<b>Rp97,728,412,938</b>

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Arah Kebijakannya**

Kebijakan Nasional untuk urusan Sekretariat DPRD sebagaimana tertuang dalam RPJMN telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam RPJMD Kota Denpasar 2021-2026, serta dijabarkan kembali lebih teknis dalam Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 dan Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2022.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2022.**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan, dan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. tujuan dan sasaran Renja tahun 2022, seperti yang tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar pada tahun 2022 ini adalah:

- Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Sasaran :

- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2022 disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4	URUSAN : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp97,728,412,938				Rp97,728,412,938
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase penyelenggaraan Administrasi Umum tugas dan fungsi Sekretariat DPRD  2. Predikat SAKIP		100%	Rp61,863,440,768			100%	Rp61,863,440,768
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD		100%	Rp16,062,266			100%	Rp16,062,266
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	Rp16,062,266	Pendapatan Asli Daerah		2 Dokumen	Rp16,062,266
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100%	Rp7,901,897,122			100%	Rp7,901,897,122

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu							
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	24 Dokumen	Rp7,901,897,122	Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Umum – Dana Lokasi Umum		24 Dokumen	Rp7,901,897,122
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		100%	<b>Rp1,685,928,470</b>			100%	<b>Rp1,685,928,470</b>
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	100%	Rp192,448,470	Pendapatan Asli Daerah		100%	Rp192,448,470
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	100%	Rp74,367,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	Rp74,367,000
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penyediaan bahan logistik kantor	Kota Denpasar,	100%	Rp222,760,000	Pendapatan Asli		100%	Rp222,760,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin			Daerah			
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	100%	Rp36,560,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	Rp36,560,000
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	100%	Rp674,544,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	Rp674,544,000
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat konsultasi dan koordinasi	Kota Denpasar dan Luar Kota	12 Kali	Rp485,249,000	Pendapatan Asli Daerah		12 Kali	Rp485,249,000
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase penyediaan jasa pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas		100%	<b>Rp2,428,902,384</b>			100%	<b>Rp2,428,902,384</b>
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	100%	Rp600,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	Rp600,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	5 Jasa	Rp1,828,902,384	Pendapatan Asli Daerah		5 Jasa	Rp1,828,902,384
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah		100%	<b>Rp1,106,510,000</b>			100%	<b>Rp1,106,510,000</b>
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	100%	Rp381,500,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	Rp381,500,000
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	100%	Rp326,860,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	Rp326,860,000
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	persentase pemeliharaan mebel	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	100%	Rp1,750,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	Rp1,750,000
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap	persentase pemeliharaan	Kota	100%	Rp139,400,000	Pendapatan		100%	Rp139,400,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Lainnya	aset tetap lainnya	Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin			Asli Daerah			
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	100%	Rp257,000,000	Pendapatan Asli Daerah		100%	Rp257,000,000
<b>4.02.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Persentase pencapaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan		100%	<b>Rp469,302,000</b>			100%	<b>Rp469,302,000</b>
4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	persentase fasilitasi Keprotokolan	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	100%	Rp469,302,000			100%	Rp469,302,000
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD		100%	<b>Rp47,904,483,826</b>			100%	<b>Rp47,904,483,826</b>
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu	Kota Denpasar, Denpasar Timur,	50 Dokumen	Rp47,144,998,826	Pendapatan Asli Daerah		50 Dokumen	Rp47,144,998,826

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Dangin Puri Kangin						
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah pengadaan pakaian dinas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	225 Stel	Rp659,810,000	Pendapatan Asli Daerah		225 Stel	Rp659,810,000
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	jumlah pelaksanaan medical chek up DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	45 orang	Rp99,675,000	Pendapatan Asli Daerah		45 orang	Rp99,675,000
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Persentase layanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD		100%	<b>Rp350,354,700</b>			100%	<b>Rp350,354,700</b>
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	jumlah rapat fraksi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	25 Kali	Rp76,359,700	Pendapatan Asli Daerah		25 Kali	Rp76,359,700
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	jumlah rapat rapat DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kangin	12 Kali	Rp273,995,000	Pendapatan Asli Daerah		12 Kali	Rp273,995,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	1. Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu 2. Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		100%  100%	<b>Rp35,864,972,170</b>			100%  100%	<b>Rp35,864,972,170</b>
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Persentase tersedianya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD tepat waktu		100%	<b>Rp4,186,864,700</b>			100%	<b>Rp4,186,864,700</b>
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	jumlah rapat bapemperda	Kota Denpasar dan Luar Kota	12 kali	Rp273,544,000	Pendapatan Asli Daerah		12 kali	Rp273,544,000
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah pembahasan ranperda	Kota Denpasar dan Luar Kota	24 kali	Rp3,761,820,700	Pendapatan Asli Daerah		24 kali	Rp3,761,820,700
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	jumlah penyusunan naskah akademik	Kota Denpasar	3 buah	Rp151,500,000	Pendapatan Asli Daerah		3 buah	Rp151,500,000
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Persentase penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu		100%	<b>Rp564,106,000</b>			100%	<b>Rp564,106,000</b>
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	jumlah rapat KUA dan PPAS	Kota Denpasar dan Luar Kota	5 kali	Rp529,906,000	Pendapatan Asli Daerah		5 kali	Rp529,906,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah rapat pembahasan perubahan KUA dan PPAS	Kota Denpasar	8 kali	Rp8,550,000	Pendapatan Asli Daerah		8 kali	Rp8,550,000
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	jumlah pembahasan APBD	Kota Denpasar	8 kali	Rp8,550,000	Pendapatan Asli Daerah		8 kali	Rp8,550,000
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	jumlah pembahasan APBD perubahan	Kota Denpasar	8 Kali	Rp8,550,000	Pendapatan Asli Daerah		8 Kali	Rp8,550,000
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	jumlah rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD	Kota Denpasar	5 kali	Rp8,550,000	Pendapatan Asli Daerah		5 kali	Rp8,550,000
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Persentase penyelenggaraan pengawasan sesuai tugas dan fungsi DPRD		100%	<b>Rp15,941,196,000</b>			100%	<b>Rp15,941,196,000</b>
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	jumlah rapat pengawasan bidang hukum	Kota Denpasar dan Luar Kota	4 kali	Rp3,912,822,000	Pendapatan Asli Daerah		4 kali	Rp3,912,822,000
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	jumlah rapat pengawasan infrastruktur	Kota Denpasar dan Luar Kota	4 kali	Rp4,173,190,000	Pendapatan Asli Daerah		4 kali	Rp4,173,190,000
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	jumlah rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	Kota Denpasar dan Luar Kota	4 kali	Rp4,154,690,000	Pendapatan Asli Daerah		4 kali	Rp4,154,690,000
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	jumlah rapat pengawasan bidang perekonomian	Kota Denpasar dan	4 kali	Rp3,642,694,000	Pendapatan Asli		4 kali	Rp3,642,694,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Perekonomian		Luar Kota			Daerah			
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	jumlah rapat pengawasan tindak lanjut BPK	Kota Denpasar	2 kali	Rp3,900,000	Pendapatan Asli Daerah		2 kali	Rp3,900,000
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	jumlah rapat pengawasan anggaran	Kota Denpasar	2 kali	Rp53,900,000	Pendapatan Asli Daerah		2 kali	Rp53,900,000
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD		100%	<b>Rp6,323,850,000</b>			100%	<b>Rp6,323,850,000</b>
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	jumlah bimtek pimpinan dan anggota DPRD	Kota Denpasar dan Luar Kota	6 kali	Rp5,022,408,000	Pendapatan Asli Daerah		6 kali	Rp5,022,408,000
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	jumlah pengangkatan kelompok pakar/tim ahli	Kota Denpasar	2 orang	Rp300,000,000	Pendapatan Asli Daerah		2 orang	Rp300,000,000
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah pengangkatan tenaga ahli fraksi	Kota Denpasar	5 orang	Rp300,000,000	Pendapatan Asli Daerah		5 orang	Rp300,000,000
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	jumlah rapat hearing dan dialog dengan masyarakat	Kota Denpasar	12 kali	Rp7,920,000	Pendapatan Asli Daerah		12 kali	Rp7,920,000
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	jumlah penyusunan program kerja DPRD	Kota Denpasar dan Luar Kota	12 kali	Rp693,522,000	Pendapatan Asli Daerah		12 kali	Rp693,522,000
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi</b>	Persentase pelaksanaan reses tepat waktu		100%	<b>Rp2,317,762,470</b>			100%	<b>Rp2,317,762,470</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Masyarakat								
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	jumlah pelaksanaan reses	Kota Denpasar	2 kali	Rp2,317,762,470	Pendapatan Asli Daerah		2 kali	Rp2,317,762,470
<b>4.02.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	Persentase tercapainya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD		100%	<b>Rp120,970,000</b>			100%	<b>Rp120,970,000</b>
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	jumlah rapat kode etik	Kota Denpasar dan Luar Kota	12 kali	Rp120,970,000	Pendapatan Asli Daerah		12 kali	Rp120,970,000
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	Persentase tercapainya penyelenggaraan fasilitas tugas DPRD		100%	<b>Rp6,410,223,000</b>			100%	<b>Rp6,410,223,000</b>
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	jumlah koordinasi dan konsultasi pimpinan DPRD	Kota Denpasar , Luar Kota dan Luar Negeri	12 kali	Rp6,410,223,000	Pendapatan Asli Daerah		12 kali	Rp6,410,223,000
<b>TOTAL</b>					<b>Rp97,728,412,938</b>				<b>Rp97,728,412,938</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD**

**4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

**Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3. Pemeliharaan Mebel
4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangun Lainnya.

**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

1. Fasilitasi Keprotokolan

### **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**

1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

### **Layanan Administrasi DPRD**

1. Fasilitasi Fraksi DPRD
2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

## **4.2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

### **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
3. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

### **Pembahasan Kebijakan Anggaran**

1. Pembahasan KUA dan PPAS
2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Pembahasan APBD
4. Pembahasan APBD Perubahan
5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

### **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**

1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.
2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
5. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
6. Pengawasan Penggunaan Anggaran

### **Peningkatan Kapasitas DPRD**

1. Bimbingan Teknis DPRD
2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
5. Penyusunan Progam Kerja DPRD

### **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**

1. Pelaksanaan Reses

### **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**

1. Pengawasan Kode Etik DPRD

### **Fasilitasi Tugas DPRD**

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

### **Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan**

Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas di Sekretariat DPRD Kota Denpasar .

### **Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif**

Total kebutuhan dana/pagu indikatif Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang tertuang dalam RKPD tahun 2021 pagunya sebesar Rp 97.728.412.938,- rincian sebagaimana tabel terlampir di bawah ini :

Tabel 4.1

Rencana Program / Kegiatan dan Pendanaan  
Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2022

<b>No.</b>	<b>Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Target Capaian Kinerja</b>	<b>Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif</b>
	<b>URUSAN</b> UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	<b>BIDANG URUSAN</b> SEKRETARIAT DPRD			
	<b>PROGRAM PENUNJANG</b> URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	<b>1. Persentase penyelenggaraan Administrasi</b>	<b>100%</b>	<b>Rp61,863,440,768</b>

	<b>KOTA</b>	<b>Umum tugas dan fungsi Sekretariat DPRD</b>		
		<b>2. Predikat SAKIP</b>	<b>BB</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD	100%	<b>Rp16,062,266</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	Rp16,062,266
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	<b>Rp7,901,897,122</b>
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan	24 dok	Rp7,901,897,122
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pelayanan administrasi umum yang selesai dengan baik dan tepat waktu	100%	<b>Rp1,685,928,470</b>
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp192,448,470
4	Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	100%	Rp74,367,000
5	Penyediaan bahan logistik kantor	persentase penyediaan bahan logistik kantor	100%	Rp222,760,000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Rp36,560,000
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Rp674,544,000
8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat konsultasi dan koordinasi	12 kali	Rp674,544,000
	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Persentase penyediaan jasa	100%	<b>Rp2,428,902,384</b>

		pelayanan penunjang kantor yang selesai dengan baik dan berkualitas		
9	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	100%	Rp600,000,000
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 jasa	Rp1,828,902,384
	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp1,828,902,384
11	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100%	Rp381,500,000
12	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100%	Rp326,860,000
13	Pemeliharaan mebel	persentase pemeliharaan mebel	100%	Rp326,860,000
14	Pemeliharaan asset tetap lainnya	persentase pemeliharaan aset tetap lainnya	100%	Rp139,400,000
15	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	Rp139,400,000
	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Persentase pencapaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100%	<b>Rp469,302,000</b>
16	Fasilitasi keprotokolan	persentase fasilitasi Keprotokolan	100%	Rp469,302,000
	<b>Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100%	<b>Rp47,904,483,826</b>
17	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah administrasi keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu	50 dok	Rp47,144,998,826
18	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	jumlah pengadaan pakaian dinas	45 orang	Rp659,810,000

		DPRD		
19	Pelaksanaan medical check Up DPRD	jumlah pelaksanaan medical chek up DPRD	45 orang	Rp99,675,000
	<b>Layanan administrasi DPRD</b>	Persentase layanan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100%	<b>Rp350,354,700</b>
20	Fasilitasi Fraksi DPRD	jumlah rapat fraksi	25 kali	Rp76,359,700
21	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	jumlah rapat rapat DPRD	12 kali	Rp76,359,700
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>1. Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu</b> <b>2. Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD</b>	<b>100%</b> <b>100%</b>	<b>Rp35,864,972,170</b>
	<b>Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD</b>	Persentase tersedianya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD tepat waktu	100%	<b>Rp4,186,864,700</b>
22	Penyusunan dan pembahasan progam pembentukan peraturan daerah	jumlah rapat bapemperda	12 kali	Rp273,544,000
23	Pembahasan rancangan peraturan daerah	jumlah pembahasan ranperda	24 kali	Rp3,761,820,700
24	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	jumlah penyusunan naskah akademik	3 buah	Rp151,500,000
	<b>Pembahasan kebijakan anggaran</b>	Persentase penyelenggaraan pembahasan kebijakan anggaran tepat waktu	100%	<b>Rp564,106,000</b>
25	Pembahasan KUA dan PPAS	jumlah rapat KUA dan PPAS	5 kali	Rp529,906,000
26	Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah rapat pembahasan perubahan KUA dan PPAS	8 kali	Rp8,550,000
27	Pembahasan APBD	jumlah pembahasan APBD	8 kali	Rp8,550,000
28	Pembahasan APBD Perubahan	jumlah pembahasan APBD perubahan	8 kali	Rp8,550,000
29	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	jumlah rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD	5 kali	Rp8,550,000
	<b>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan</b>	Persentase penyelenggaraan pengawasan sesuai	100%	<b>Rp15,941,196,000</b>

		tugas dan fungsi DPRD		
30	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan hukum	jumlah rapat pengawasan bidang hukum	4 kali	Rp3,912,822,000
31	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	jumlah rapat pengawasan infrastruktur	4 kali	Rp4,173,190,000
32	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	jumlah rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	4 kali	Rp4,154,690,000
33	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	jumlah rapat pengawasan bidang perekonomian	4 kali	Rp3,642,694,000
34	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan	jumlah rapat pengawasan tindak lanjut BPK	2 kali	Rp3,642,694,000
35	Pengawasan Pengguna Anggaran	jumlah rapat pengawasan anggaran	2 kali	Rp53,900,000
	<b>Peningkatan kapasitas DPRD</b>	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	100%	<b>Rp6,323,850,000</b>
36	Bimbingan teknis DPRD	jumlah bimtek pimpinan dan anggota DPRD	6 kali	Rp5,022,408,000
37	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	jumlah pengangkatan kelompok pakar/tim ahli	2 org	Rp5,022,408,000
38	Penyediaan tenaga ahli fraksi	jumlah pengangkatan tenaga ahli fraksi	5 org	Rp5,022,408,000
39	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	jumlah rapat hearing dan dialog dengan masyarakat	12 kali	Rp7,920,000
40	Penyusunan Progam Kerja DPRD	jumlah penyusunan program kerja DPRD	12 kali	Rp693,522,000
	<b>Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat</b>	Persentase pelaksanaan reses tepat waktu	100%	<b>Rp2,317,762,470</b>
41	Pelaksanaan reses	jumlah pelaksanaan reses	2 kali	<b>Rp2,317,762,470</b>
	<b>Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD</b>	Persentase tercapainya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	100%	<b>Rp120,970,000</b>
42	Pengawasan kode etik DPRD	jumlah rapat kode etik	12 kali	Rp120,970,000
	<b>Fasilitasi tugas DPRD</b>	Persentase tercapainya penyelenggaraan fasilitas tugas DPRD	100%	<b>Rp6,410,223,000</b>

43	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	jumlah koordinasi dan konsultasi pimpinan DPRD	12 kali	Rp6,410,223,000
<b>TOTAL</b>				<b>Rp97,728,412,938</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Denpasar selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat DPRD, dan renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kota Denpasar sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Denpasar melaksanakan 2 (dua) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dengan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 97.728.412.938,-

Untuk dapat mengoptimalkan realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2022 ini, tentu sangat dipengaruhi oleh pendanaan yang memadai, oleh karena itu kiranya realisasi rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2020, dijadikan bahan pertimbangan oleh Tim dalam mengalokasikan anggaran untuk Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam APBD Kota Denpasar tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 17 Juni 2021  
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



**I Putu Gede Dharma Wiyasa, SE**  
**Nip. 19611003 198203 1 004**